

POTRET PENERAPAN SOCIAL DISTANCING DALAM MEMUTUS RANTAI COVID-19**PORTRAIT OF THE APPLICATION OF SOCIAL DISTANCING IN BREAKING THE COVID-19**

**Inayati¹, Meyrisdika Nur Rohmah¹, Muhamad Yusuf¹,
Suparto Iribaram¹, Rachmad Surya Muhandy^{1a}**

¹ IAIN Fattahul Muluk Papua

^a Korespondensi: Rachmad Surya Muhandy, E-mail: muhandy.rachmads@gmail.com

(Diterima: 10-08-2021; Ditelaah: 12-08-2021; Disetujui: 25-10-2021)

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of social distancing in Bebon Jaya Village, Bonggo District, Sarmi Regency on the regulations of social distance guarding the government has set during the Covid-19 period. Therefore, this article also describes the implementation of social distancing in Bebon Jaya Village, Bonggo District, Sarmi Regency, Papua Province. The research method used by this study is a qualitative approach and social phenomenology paradigm. The research results show that social distancing is mainly known and understood by the community to prevent the spread of Covid-19. However, some residents or communities of Bebon Jaya Village violate the rules in the form of health protocols, which have been arranged by the government and related institutions. High security, restrictions on citizen activities, regulations that oblige the implementation of social distancing, community negligence in implementing social distancing, and sanctions for violations at the Covid-19 pandemic, which are in consequence of a mutual agreement by residents to continue activities that emerged from residents' boredom.

Keywords: Covid-19, Social Distancing, Health Protocols

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *social distancing* pada masyarakat Kampung Bebon Jaya Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi terhadap peraturan jaga jarak sosial yang telah ditetapkan oleh Pemerintah selama masa Covid-19, maka artikel ini juga memaparkan pelaksanaan *social distancing* di Kampung Bebon Jaya Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi Propinsi Papua. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dan paradigma fenomenologi sosial. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah menunjukkan bahwa *social distancing* sebagian besar sudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat Kampung Bebon Jaya sebagai strategi pencegahan penyebaran Covid-19, namun masih ada sebagian warga/masyarakat yang melanggar aturan berupa protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan dinas terkait. Penjagaan yang begitu ketat, pembatasan aktifitas warga, aturan yang mewajibkan pelaksanaan *social distancing*, dan kelalaian masyarakat dalam menerapkan *social distancing*, serta sanksi atas pelanggaran di masa pandemi Covid-19, yang merupakan konsekuensi kesepakatan bersama oleh warga untuk tetap beraktifitas yang ditimbulkan akibat kejenuhan warga.

Kata Kunci: Covid-19, Social Distancing, Protokol Kesehatan

Inayanti., Rohmah, M, N., Yusuf, M., Iribaram, S., & Muhandy, R,S. (2021). Potret Penerapan Sosial distancing dalam memutuskan rantai covid-19. *Jurnal Sosial Humaniora* 12(2): 128-140.

PENDAHULUAN

Penyebaran Covid-19 yang cepat menjadi perhatian besar bagi warga dunia, dimana virusnya berkisar dari flu sampai penyakit yang lebih beresiko semacam *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-CoV). Penyakit yang diakibatkan oleh Virus Corona yang juga dikenal Covid-19 ini merupakan spesies baru yang ditemukan pada tahun 2019. Terlebih di Indonesia terjadi kehebohan di awal tahun 2020 dengan terdapatnya virus corona yang merupakan pandemi global serta dengan itu seluruh masyarakat di semua pihak merasakan banyak kepanikan dan ketakutan, yang menyebabkan langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Era pandemi Corona masyarakat dituntut untuk mengurangi aktifitas di luar rumah yang mempengaruhi adanya penyebaran Virus Corona. Adanya fenomena Covid-19, Pemerintah Indonesia memberlakukan berbagai aturan untuk menjaga jarak atau *social distancing*. Sejak pandemi Covid-19 muncul, semua orang mengalami kendala untuk melakukan kehidupan normal seperti biasa akibat pembatasan yang dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19 yang begitu cepat sampai pada pelosok daerah di Indonesia.

Kebijakan terbaru pemerintah pusat adalah menciptakan new normal. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap melakukan aktivitas sehari-hari namun tetap menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. New normal merupakan cara penanggulangan penyebaran virus Covid-19 pada bidang kesehatan dan sosial. Skenario new normal dilakukan melalui pertimbangan dari hasil riset dan kesiapan daerah tertentu. Beberapa daerah sudah menetapkan aturan berkaitan penerapan new normal sambil terus melaksanakan usaha pencegahan

Covid-19. Dengan harapan masyarakat harus menjalankan aturan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah, namun tidak berlaku untuk wilayah-wilayah yang masih rentan terhadap penyebaran Virus Corona.

Covid-19 yang merebak dan menimbulkan kepanikan bagi setiap orang tanpa terkecuali, bahkan menjangkau kampung-kampung terpencil yang ada di Papua seperti halnya di Kampung Bebon Jaya Kabupaten Sarmi yang berada di Utara Propinsi Papua. Kampung Bebon Jaya Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi merupakan Kabupaten yang terletak di Timur Indonesia tepatnya di Propinsi Papua merupakan Kabupaten terbaru yang dimekarkan pada tahun 2002 dari Kabupaten Jayapura. Dimana Distrik Bonggo, dengan jumlah penduduk : 4.315 jiwa. (Data Kampung Bebon Jaya Tahun 2019). Kampung ini sebagian besar penduduknya merupakan transmigran asal pulau Jawa yang mayoritas beragama Islam, yang mata pencahariannya adalah petani, berkebun dan berdagang. Semenjak merebaknya Virus Corona menimbulkan ketidaknyamanan dalam beraktifitas bagi sebagian warga. Bahkan masyarakat yang ingin melakukan ibadah seperti Sholat Jum'at, Sholat berjamaah di Masjid dan Musholah, terdapat kekhawatiran dari pihak Pemerintah tentang merebaknya virus tersebut di wilayahnya, sehingga memunculkan tekanan kebijakan Pemerintah melalui Dinas Kesehatan, dan juga aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi dan DPRD khususnya seperti mengatur aktivitas warga agar sesuai dengan protokol kesehatan, menjaga jaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, pembersihan dan penyemprotan di setiap rumah-rumah baik rumah warga maupun rumah ibadah.

Pembatasan aktivitas warga menimbulkan akibat pada sektor ekonomi

para pedagang, yang biasanya berjualan 24 jam, kini harus berjualan mengikuti sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Propinsi Papua yang merujuk pada aturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Begitu pula sektor pendidikan, dimana para pelajar seperti SD, SMA, SMK, dan sederajatnya mereka yang biasanya melakukan aktifitas sehari-hari mereka di sekolah, tapi kini mereka harus melakukannya secara daring dari rumah masing-masing.

Pada saat pandemi Covid-19 Musholah *At-Tayyibah* yang berada di Kampung Bebon Jaya tetap melaksanakan sholat lima waktu dengan jumlah lebih dari 10-an orang, namun mereka tidak secara keseluruhan menerapkan *social distancing*, yaitu tidak semua menggunakan masker, dan tidak melakukan penutupan rumah ibadah sesuai dengan anjuran dari Pemerintah, hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan warga.

Selain itu kegiatan-kegiatan Tahlilan atau Yasinan rutin pada setiap malam Jum'at dengan cara bergilir dari rumah kerumah tetap dilaksanakan walaupun adanya Pandemi Covid-19, para jamaah tetap aktif melaksanakan kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan karena dengan adanya kegiatan tersebut maka Tali Silaturahmi tidak akan terputus dan kerukunan masyarakat akan semakin erat. Begitu pula dengan masyarakat yang lain seperti Petani, buruh dan pedagang, mereka tetap melaksanakan aktifitasnya. Masyarakat beranggapan bahwa jika tidak melaksanakan aktifitas atau bekerja seperti biasanya, maka tidak ada yang akan menanggung biaya keseharian mereka dan hal ini dilakukan secara sembunyi tanpa sepengetahuan aparat Kampung.

Ada beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat Kampung Bebon Jaya, bahwa pemahaman masyarakat terhadap protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 yang masih minim, seolah acuh tak acuh terhadap himbauan Pemerintah serta kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi dimasa pandemic Corona, namun peraturan tetap merupakan peraturan yang mau tidak

mau harus dilaksanakan oleh masyarakat Kampung Bebon Jaya Kabupaten Sarmi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *social distancing* pada masyarakat Kampung Bebon Jaya terhadap pelaksanaan jaga jarak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kampung pada masa pandemi Covid-19.

MATERI DAN METODE

Di tahun 2020 ini umat manusia di seluruh dunia di goncang dengan pandemi Virus Corona (Covid-19) yang menimbulkan kecemasan disegala tempat, termasuk Indonesia. Untuk itu pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk mengatasi wabah ini walau kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti himbauan tersebut (Buana, 2020).

Penelitian lain menyatakan bahwa pandemi Covid-19 mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia, diantaranya pada sektor pendidikan terdapat sistem *daring* dengan dampak kurang efektif. Lebih jauh sektor ekonomi terjadi perubahan warga untuk lebih kreatif akan tetapi tetap berdampak pada penurunan pendapatan. Disisi spiritual, kegiatan keagamaan beradaptasi melalui kondisi yang berimbas pada aktifitas keagamaan di rumah (M. W. P. Putra & Kasmiarno, 2020).

Indonesia sedang mengalami pandemi Covid-19 dan menerapkan prinsip *social distancing* melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini menggambarkan pengaruh *social distancing* pada kelompok masyarakat yang rentan, dimana kelompok Lansia merupakan kelompok yang paling beresiko menularkan dan tertular virus, untuk itu diperlukan keseriusan dan kerjasama semua lini (Pradana & Casman, 2020).

Situasi pelaksanaan *social distancing* berbeda ditiap masyarakat. Yang membahas tentang tingkat pengetahuan masyarakat tentang kebijakan Pemerintah yang berkaitan pembatasan jarak interaksi serta menjauhi kerumunan dalam upaya

memutus penyebaran Covid-19. Metode peneliti yang digunakan penelitian ini adalah studi Deskriptif kualitatif (Pratama & Hidayat, 2020).

Penganut agama Islam mempercayai pandemi itu berasal dari Allah SWT, akan tetapi umat Muslim diharapkan tidak terlalu meresponnya serta mewujudkan fenomena tersebut agar meningkatkan modal Taqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, Fiqih Islam mampu berperan sebagai solusi serta pedoman agar dibuatkannya kebijakan penanggulangan pandemic Covid-19. Pemerintah yang merupakan pemimpin di negara ini telah melaksanakan kebijakan berkaitan penanganan Covid-19. Banyak masyarakat menanggapi dengan mentaati kebijakan yang ditetapkan Pemerintah, namun tidak sedikit juga yang melanggar karena kurangnya pemahaman masyarakat akibat edukasi yang kurang oleh Pemerintah serta tokoh agama Indonesia (Siregar & Jubba, 2020).

Minimnya pengetahuan warga berkaitan virus corona, tanda-tanda, cara penyebarannya serta mengatasinya. Warga mempunyai keinginan tentang adanya perhatian dari pemerintah pada warga supaya menyampaikan informasi tentang corona virus (Nasution & Hidayah, 2021).

Peran pemerintah secara terus menerus memberikan anjuran dan meminta keikutsertaan warga agar tercapainya hasil kebijakan pemerintah secara maksimal, dibutuhkan keikutsertaan warga dalam rangka penanggulangan wabah agar melaksanakan seluruh kebijakan yang telah ditetapkan untuk dapat menciptakan sinergitas agar tujuan memutus mata rantai penyebaran virus corona, juga diperoleh pula bahwa Ketua RT/RW adalah salahsatu solusi yang mampu mendukung pemerintah untuk menggerakkan sinergitas dengan warga (Wahidah., et.al, 2020).

Berbagai kebijakan sudah diterapkan Indonesia untuk mengendalikan serta mencegah virus corona. Akan tetapi, kebijakan tersebut hendaknya didukung pula oleh kesadaran warga juga system kesehatan yang baik (Putri, 2020).

Warga dipaksa agar melakukan adaptasi melalui gaya hidup baru yang dipandang dapat memperkecil resiko warga terjangkit virus corona serta pada jangka panjang mampu membuat warga bertahan hidup ditengah pandemic corona (Purnama., et.al, 2020).

Memakai masker belum cukup untuk menjaga diri terhadap virus corona, untuk itu hendaknya dilakukan pula dengan *social distancing* serta kebersihan tangan. Mengikuti himbauan yang disampaikan oleh tenaga kesehatan setempat. Agar dapat melakukan pencegahan penyebaran virus corona seluruh masyarakat disarankan agar melakukan pola hidup bersih serta sehat (Nastia., et.al, 2021).

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah *social distancing* pada masyarakat Bebon Jaya Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi di masa pandemi Covid-19 yaitu masyarakat sangat terbatas dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari, dimana terdapat aturan yang mengekang masyarakat untuk beraktifitas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, namun di Kampung Bebon Jaya kehidupan masyarakat tetap melaksanakan berbagai aktifitas dengan cara sembunyi-sembunyi walaupun terdapat sedikit ketakutan warga akan sanksi yang ada, dan juga melakukan anjuran Pemerintah walaupun tidak secara keseluruhan. Selain itu terdapat kesepakatan antar warga untuk tetap melaksanakan aktifitas tanpa diketahui aparat kampung guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kebijakan

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, dan mengatur perilaku dalam rangka menciptakan nilai-nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan tersebut akan menjadi pedoman perilaku utama bagi setiap anggota organisasi atau komunitas. Secara umum, pedoman tersebut bersifat proaktif dan memiliki sifat pemecahan masalah. Kebijakan lebih adaptif

dan interpretatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.” Kebijakan juga diharapkan memiliki karakteristik umum tanpa menghilangkan karakteristik lokal yang spesifik (Saraswaty, 2018). Kebijakan ialah serangkaian aksi ataupun kegiatan yang diusulkan seorang, kelompok, ataupun Pemerintah pada sesuatu area tertentu dimana mempunyai bermacam hambatan (kesulitan-kesulitan), dan bermacam peluang pada realisasi usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan tersebut (Agustino, 2020).

Solidaritas Mekanik

Solidaritas mekanik adalah perasaan silih yakin diantara para anggota pada sesuatu kelompok ataupun komunitas. Seandainya orang silih yakin, dengan demikian mereka hendak bersatu ataupun bersahabat, jadi silih hormat-menghormati, jadi terdorong supaya bertanggung jawab dan mencermati kepentingan sesamanya. Dari uraian tersebut maka solidaritas sanggup dimengerti sebagai adanya rasa silih yakin, (memiliki) cita-cita bersama, kesetiakawanan, dan memiliki rasa sepenaggungan di antara orang selaku anggota kelompok. Karena terdapatnya perasaan emosional dan moral yang diyakini bersama (B. S. Putra, 2015) . Solidaritas mekanik didasarkan pada sebuah kesadaran kolektif bersama, yang memusatkan pada keseluruhan kepercayaan-kepercayaan dan sentimen-sentimen yang rata-rata terdapat pada warga yang sama itu. Jalinan pada solidaritas mekanik ini merupakan kepercayaan bersama, cita-cita komitmen moral (Wulandari, 2016). Solidaritas mekanik adalah sesuatu yang tergantung pada individu. Individu yang mempunyai berbagai sifat yang sama serta menganut keyakinan serta pola yang sama. Oleh sebab itu sifat individualitas tidak berkembang, individual ini rutin akan dilumpuhkan oleh tekanan yang besar sekali untuk konformitas (Alhafizah., et.al, 2019).

Hegemoni

Hegemoni adalah kritik terhadap pemikiran Marxis yang lebih menekankan pada postivistik, deterministik, mekanistik, utamanya dalam memandang perubahan sosial, revolusi, dan pentingnya peranan reprensif dari negara serta masyarakat-masyarakat kelas, Marxisme memiliki anggapan kebudayaan kehidupan manusia semata-mata adalah cerminan dari dasar ekonomi masyarakat (Lestari, 2019). Selain itu, hegemoni merupakan sebuah konsesus dimana ketertundukan dimana peroleh melalui penerimaan ideologis kelas yang menghegemoni oleh kelas yang terhegemoni. Hegemoni bukan hubungan dominasi dengan memakai kekuasaan, tetapi hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik serta ideologis (Siswati, 2017). Hegemoni adalah merupakan sebuah teori politik paling penting pada abad XX dan sangat berpengaruh bagi kepemimpinan, dominasi, disuatu negara atas negara lain. Artinya hegemoni dapat digunakan untuk mendeskripsikan sebuah dominasi yang di lakukan satu pihak atas pihak lainnya (Harjito, 2009). Hegemoni merupakan suatu kemenangan yang didapatkan melewati sebuah mekanisme konsesus ketimbang melewati sebuah penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Hegemoni juga berpedoman pada kedudukan ideologi dari satu atau lebih kelompok di dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari yang lainnya (Agus, 2011).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi sosial. Penelitian di Kampung Bebon Jaya Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi. Sebagai instrumen penelitian adalah masyarakat Kampung Bebon Jaya, dengan instrumen kuncinya adalah Aparat Kampung Bebon Jaya yaitu Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi partisipatoris, *indept interview* dan dokumentasi. Teknik

pengolahan data dengan menggunakan model bagan alir (Miles, 1992, p. 18-19) yaitu Reduksi data, kemudian melakukan display data dan selanjutnya melakukan Conclusion Drawing/verifikasi atau penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjagaan Yang Cukup Ketat Pada Masa Covid-19

Merebaknya Virus Corona sampai pula ke wilayah Timur Indonesia yaitu di wilayah Kabupaten Sarmi yang merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Papua, sehingga menimbulkan kekhawatiran yang besar pada masyarakat dan Pemerintah Daerah. Hal ini menimbulkan berbagai kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk memperketat penjagaan di berbagai sudut wilayah Kabupaten Sarmi termasuk pula Distrik Bonggo Kampung Bebon Jaya. Penjagaan yang ketat terhadap aktifitas warga dilakukan karena tidak semua masyarakat mematuhi berbagai aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga penjagaan tersebut menimbulkan ketaatan akibat adanya sanksi yang diterapkan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan Bapak Hanafi yang merupakan Plt. Kepala Kampung Bebon Jaya Distrik Bonggo yang mengatakan sebagai berikut.

“Selama masa Covid-19 bersama rekan-rekan kerja melakukan kegiatan pencegahan, penjagaan Covid-19 seperti membuat penutupan jalan keluar masuknya masyarakat, penutupan tempat pariwisata yang ada di Kampung Bebon Jaya, melakukan himbauan protokol kesehatan kepada warga melalui KIM, melalui karang taruna, relawan, dan disampaikan ketika shalat jum'at, memasang spanduk pencegahan Covid-19. Apabila ada masyarakat yang melanggar ketentuan yang telah di paparkan diatas maka masyarakat mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuannya berupa kerja sosial misalnya membersihkan lingkungan”.

Solidaritas mekanik didasarkan pada sebuah kesadaran kolektif bersama, yang memusatkan pada keseluruhan kepercayaan-kepercayaan dan sentimen-sentimen yang rata-rata terdapat pada warga yang sama itu. Jalinan pada solidaritas mekanik ini merupakan kepercayaan bersama, cita-cita komitmen moral (Wulandari, 2016). Solidaritas mekanik adalah sesuatu yang tergantung pada individu. Individu yang mempunyai berbagai sifat yang sama serta menganut keyakinan serta pola yang sama. Oleh sebab itu sifat individualitas tidak berkembang, individual ini rutin akan dilumpuhkan oleh tekanan yang besar sekali untuk konformitas (Alhafizah., et.al, 2019).

Penjagaan yang ketat dilakukan oleh warga/masyarakat Kampung Bebon Jaya adalah sebuah langkah agar mencegah rantai penyebaran Covid-19. Kepala Kampung Bebon Jaya bersama rekan-rekan kerjanya memberikan himbauan-himbauan pada masyarakat berupa protokol kesehatan melalui KIM, karang taruna, relawan, memasang spanduk Covid-19, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, serta penyemprotan disinfektan di tiap-tiap rumah warga, serta penjagaan yang dilakukan di Kampung Bebon Jaya berupa Penutupan jalan keluar masuknya warga, penutupan tempat wisata, yang merupakan kesadaran kolektif bersama dari warga kampung untuk mengantisipasi penyebaran Virus Corona, yang merupakan cita-cita kepercayaan bersama dan merupakan tekanan yang harus dilakukan oleh warga dari berbagai aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yang merupakan turunan dari aturan Pemerintah Pusat, dimana terdapat sanksi di dalamnya yang mau tidak mau harus dilaksanakan warga, dengan melakukan penjagaan yang ketat terhadap keluar masuknya orang dari dan ke Kampung Bebon Jaya.

Pembatasan Aktifitas Warga

Warga mulai mengurangi aktifitas di malam hari di luar rumah. Pembatasan dilakukan untuk mengendalikan penularan Covid-19. Pembatasan aktifitas warga di Kampung Bebon Dalam pelaksanaan pembatasan aktifitas warga, Pemerintah Kampung dan Tim gugus Tugas Covid-19 sangat mengharapakan kepada seluruh warga Kampung Bebon Jaya Kabupaten Sarmi agar dapat mengikuti anjuran/Protokol Kesehatan yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Kampung, daerah maupun Pemerintah Pusat. Jaya Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi mulai menerapkan aturan tentang jam malam agar membatasi aktifitas di luar rumah untuk memperkecil resiko penularan Covid-19. jam operasional layanan secara langsung di toko, rumah makan, cafe, mini market, supermarket, serta mal sampai dengan pukul 18.00 WIT. sedangkan untuk aktifitas warga Kampung Bebon Jaya Distrik Bonggo kegiatan diluar rumah dilaksanakan pembatasan maksimal sampai pukul 20.00 WIT. Hal ini seperti yang diutarakan informan Turudi yang merupakan sekretaris Kampung Bebon Jaya, yang mengatakan sebagai berikut.

“Warga/masyarakat Kampung Bebon Jaya telah mengetahui bahwa dengan adanya pembatasan aktifitas warga, dikarenakan adanya Covid-19 ini, sehingga membuat aktifitas warga/ masyarakat sangat terbatas dari segala hal. Sehingga Pemerintah Kampung Bebon Jaya menerapkan pembatasan aktifitas untuk warga/masyarakat yang harus dipatuhi, sehingga warga harus melakukan aktifitasnya, baik para petani, pedagang kaki lima, kios-kios, buruh dan penjual keliling mulai dari Jam 6.00 WIT s/d 14.00 WIT. Pembatasan aktivitas warga diantaranya: aktifitas yang dilakukan di luar rumah, kemudian kegiatan yang harus dilakukan yaitu dimulai dari kegiatan bekerja di rumah (*Work from home*), belajar dari rumah (*Study from home*), pembatasan aktifitas agama, pembatasan aktifitas di tempat umum serta pembatasan mobilisasi masyarakat, hal ini merupakan kebijakan

Pemerintah Kampung agar memutus rantai penyebaran Covid-19. Pemberlakuan aktifitas ini dilakukan oleh Pemerintah Kampung sejak tanggal 17 Mei 2020”.

Kebijakan ialah serangkaian aksi ataupun kegiatan yang diusulkan seorang, kelompok, ataupun Pemerintah pada sesuatu area tertentu dimana mempunyai bermacam hambatan (kesulitan-kesulitan), dan bermacam peluang pada realisasi usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan tersebut (Agustino, 2020). Kebijakan hendaknya di pahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagaimana keputusan yang berdiri sendiri (Nurfurqon, 2020).

Diberlakukannya penerapan pembatasan aktifitas yang diterapkan oleh Pemerintah Kampung Bebon Jaya kepada warga/masyarakat Kampung Bebon Jaya untuk melakukan aktifitasnya dipaksakan untuk sesuai dengan anjuran Pemerintah dan protokol kesehatan, baik para petani, pedagang kaki lima, kios-kios, BUMN (semua Bank), buruh dan penjual keliling mulai dari Jam 6.00 WIT s/d 14.00 WIT. Sehingga pembatasan aktifitas yang dilaksanakan yaitu dimulai dari aktifitas bekerja di rumah (*Work from home*), belajar dari rumah (*Study from home*), pembatasan aktifitas agama, pembatasan aktifitas di tempat umum serta pembatasan mobilisasi masyarakat, guna menekan/memutus rantai penyebaran atau angka positif Covid-19 di Kampung Bebon Jaya. Pemberlakuan aktifitas ini diterapkan oleh Pemerintah Kampung sejak tanggal 17 Mei 2020. Pembatasan kegiatan ini merupakan pelaksanaan penjabaran kebijakan yang meruapakan realisasi dari aturan yang telah ditetapkan yang merupakan rangkaian tindakan atau aktifitas yang dilaksanakan oleh warga Kampung Bebon Jaya dimana adanya berbagai hambatan (kesulitan-kesulitan) untuk menjalankan pembatasan aktifitas dalam rangka untuk mencapai tujuan yaitu guna memutus rantai

penyebaran Covid-19. Hal tersebut hendaknya dapat dipahami oleh warga sebagai rangkaian aktifitas yang sedikit banyaknya berkaitan dengan konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan yang melalaikan aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Namun demikian, hendaknya setiap kebijakan yang dibuat memiliki kesepakatan antara si pelaksana keputusan dalam hal ini masyarakat Kampung Bebon Jaya dan si pembuat keputusan yaitu Pemerintah Daerah. Dimana kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan aktifitas warga adalah pemaksaan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada warganya, bukan merupakan kesepakatan bersama.

Aturan Yang Mewajibkan Pelaksanaan *Social Distancing*

Dalam pelaksanaan aturan yang mewajibkan *social distancing* maka Pemerintah Kampung maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi mewajibkan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenkes, maka warga harus mematuhi dan menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, guna memutus rantai penyebaran Covid-19.

Merebaknya Virus Corona menuntut Pemerintah Kabupaten Sarmi untuk mengambil sikap dan menghimbau kepada setiap individu dan masyarakat untuk menerapkan *social distancing* dalam menghadapi pandemi Covid-19. *Social distancing* merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi Virus Corona dengan mendorong masyarakat sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain.

Aturan atau himbauan yang diterapkan oleh Kabupaten Sarmi kepada Masyarakat Distrik Bonggo ialah mematuhi peraturan protokol kesehatan, memakai masker secara benar, penyemprotan disinfektan secara berkala, tidak melakukan

perjalan jauh keluar Kota Kabupaten Jayapura atau keluar Papua, serta himbauan pada masyarakat agar tetap tenang di masing-masing Kampung serta tetap melakukan isolasi mandiri. Kabupaten Sarmi memberikan beberapa contoh penerapan *social distancing* kepada masyarakat yaitu bekerja dari rumah, belajar di rumah secara *online* bagi siswa sekolah serta mahasiswa, menghindari pertemuan atau acara yang diikuti orang banyak, tidak berkunjung ke orang yang sedang sakit.

Covid-19 sangat mengancam kehidupan sosial masyarakat, untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, dimana Pemerintah Kampung yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah di atasnya yakni Distrik dan Kabupaten mengeluarkan beberapa peraturan serta himbauan-himbauan yang diberikan kepada warga/ masyarakat, khususnya Kampung Bebon Jaya Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi juga telah dilakukan berbagai himbauan-himbauan, yang suka atau tidak suka tetap harus dilaksanakan oleh warganya, akibat dari kebijakan yang diturunkan yang berlaku untuk seluruh warga Kabupaten. Namun demikian pada kenyataannya masyarakat tetap bertani atau melakukan aktifitas nelayan walaupun tidak dalam jumlah banyak orang untuk melakukan suatu pekerjaan agar perekonomian warga tetap berjalan, dimana dalam melaksanakan pekerjaan sudah pasti membutuhkan bantuan orang lain sehingga istilah jaga jarak tidak berlaku untuk beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh warga Kampung Bebon Jaya dalam melakukan pekerjaannya.

Kelalaian Masyarakat Dalam Penerapan *Social Distancing*

Social distancing merupakan suatu langkah yang dilakukan agar menekan serta memutus rantai penyebaran Covid-19 yang sudah menyebar di Indonesia dan di berbagai wilayah serta Negara-negara

lainnya. Berbagai strategi dan peraturan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah agar menekan serta memutus rantai penyebaran Covid-19 diantara Strategi yang dilakukan Pemerintah ialah dengan gerakan masker, penelusuran kontak (*trancing*) dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test atau tes cepat, edukasi masyarakat isolasi mandiri, isolasi, Rumah sakit. Adapun peraturan yang ditetapkan Pemerintah ialah dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan strategi yang ditetapkan oleh daerah adalah menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun. Namun masih banyak warga yang mengabaikan strategi dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah. masyarakat sangat merasa jenuh dengan adanya penerapan *social distancing* ini karena mereka berada di dalam rumah terus dan tidak bisa beraktifitas keluar rumah. Hingga kondisi ekonomi masyarakat sangat berimbas hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat tidak mempunyai penghasilan tetap, serta terdapat himbuan agar tidak keluar rumah melakukan aktifitas sosial menjadi terbatas. Bukan dalam arti masyarakat tidak mau mematuhi peraturan tersebut, namun masyarakat mengingat kondisi ekonomi mereka saat ini yang sangat memprihatinkan sekali, jika mereka hanya berdiam diri dirumah dan tidak mendapatkan hasil apapun bagaimana mereka bisa menghidupi keluarganya. Sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan berjualan, melakukan bisnis, secara diam-diam agar tidak di ketahui oleh Pemerintah Daerah. Seperti halnya pada masyarakat Kampung Bebon Jaya yang masih banyak melanggar aturan, walaupun telah mengetahui aturan tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan informan Agung warga Kampung Bebon Jaya yang mengatakan sebagai berikut.

“Masih banyak masyarakat yang melanggar aturan akibat berlama-lamanya pembatasan aktivitas masyarakat. Memang

tidak salah juga, kalau masyarakat tidak bekerja, mau menghidupi keluarga pakai apa? Sedangkan di Kampung sebagian besar masyarakatnya petani/berkebun. Secara otomatis masyarakat tetap melakukan aktivitas secara diam-diam agar kebutuhannya tetap terpenuhi walaupun dalam bekerja tetap memakai masker dan ini dilakukan saling tahu sajalah antara tetangga dan saling menjaga agar tidak ketahuan aparat kampung”.

Hegemoni adalah kritik terhadap pemikiran Marxis yang lebih menekankan pada postivistik, deterministik, mekanistik, utamanya dalam memandang perubahan sosial, revolusi, dan pentingnya peranan reprensif dari negara serta masyarakat-masyarakat kelas, Marxisme memiliki anggapan kebudayaan kehidupan manusia semata-mata adalah cerminan dari dasar ekonomi masyarakat (Lestari, 2019). Hegemoni adalah sebuah konsesus dimana ketertundukan dimana peroleh melalui penerimaan ideologis kelas yang menghegemoni oleh kelas yang terhegemoni. Hegemoni bukan hubungan dominasi dengan memakai kekuasaan, tetapi hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik serta ideologis (Siswati, 2017). Hegemoni dapat digunakan untuk mendeskripsikan sebuah dominasi yang dilakukan satu pihak atas pihak lainnya (Harjito, 2009). Hegemoni merupakan suatu kemenangan yang di dapatkan melewati sebuah mekanisme konsesus ketimbang melewati sebuah penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Hegemoni juga berpedoman pada kedudukan ideologi dari satu atau lebih kelompok di dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari yang lainnya (Agus, 2011).

Langkah penerapan *social distancing* ini merupakan kesadaran kolektif bersama untuk di terapkan, yang merupakan tekanan cita-cita kepercayaan bersama dan tekanan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Kampung diberbagai wilayah. Namun masyarakat harus memiliki rasa saling kerja sama dan harus memiliki rasa

kesadaran diri akan bahayanya yang ditimbulkan oleh Virus Covid-19. Dengan cepat Pemerintah Daerah melakukan penerapan *social distancing*, yang merupakan sebuah kemenangan yang diperoleh melalui sebuah mekanisme konsesus ketimbang melewati sebuah penindasan terhadap kelas sosial lainnya, serta berpedoman pada kedudukan ideologi dari satu atau lebih kelompok di dalam masyarakat. Sebab penerapan *social distancing* ini adalah salah satu langkah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Namun dengan adanya penerapan *social distancing* pada masyarakat justru memunculkan kejenuhan karena mereka hanya berdiam diri di dalam rumah secara terus menerus dan tidak bisa beraktifitas keluar rumah. Hingga kondisi ekonomi masyarakat terpuruk, karena sebagian masyarakat tidak mempunyai pendapatan tetap, serta adanya himbuan agar tidak keluar rumah menyebabkan aktifitas sosial menjadi terbatas. Namun masyarakat memberanikan diri keluar rumah untuk mencari pekerjaan agar mampu memperoleh pendapatan dan mampu menafkahi keluarganya serta mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan jalan kesepakatan bersama masyarakat lainnya di Kampung Bebon Jaya untuk melakukan aktifitas.

Untuk memperlancar *social distancing* tersebut Pemerintah Daerah membuat kebijakan baru yaitu dengan Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD) Pada Propinsi Papua, yang juga berlaku di Kampung Bebon Jaya. Namun sifat acuh masyarakat dalam merespon situasi pandemi tersebut mengakibatkan kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Sebagian masyarakat juga masih ada yang mendatangi tempat-tempat umum serta berpergian tanpa memakai masker sesuai protokol kesehatan saat berpergian ke zona PSDD.

Sanksi Terhadap Pelanggaran

Pemerintah Kampung maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi telah menerapkan sanksi terhadap warga/masyarakat yang telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, baik TNI, POLRI, PNS, maupun warga sipil tetap akan mendapatkan sanksi apabila melanggar aturan tersebut, sehingga sanksi tersebut tidak tebang pilih, disamping itu juga agar tidak ada rasa cemburu sosial antara satu dengan yang lain.

Pandemi Covid-19 telah menjadi sangat berbahaya sehingga Pemerintah Kabupaten Sarmi memberikan beberapa kebijakan diantara kebijakan Pemerintah Kabupaten Sarmi ialah *social distancing*, *work from home*, *study from home* atau yang lebih di kenal masyarakat sebagai "beraktifitas dirumah saja". Untuk masyarakat Kampung Bebon Jaya Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi yang terpaksa harus bekerja tetap harus mengikuti standar pencegahan penularan Virus Corona, sedangkan masyarakat lainnya yang lebih beruntung bisa bekerja ataupun sekolah diwajibkan tetap tinggal dirumah, keluar rumah hanya untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Sanksi yang diberikan oleh Pemerintah terhadap masyarakat yang melanggar ialah memberikan teguran terhadap pelanggar, dan apabila di kemudian hari melakukan pelanggaran kembali, maka pelanggar tersebut diberi sanksi seperti denda uang, *push up*, serta membersihkan lingkungan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan Bapak Hanafi yang merupakan Plt. Kepala Kampung Bebon Jaya Distrik Bonggo yang mengatakan sebagai berikut.

"Apabila ada masyarakat/warga yang melakukan maka diberikan sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis, menyapu jalan, membersihkan saluran air. Karena apabila sanksi dan aturan tersebut tidak dijalankan, maka kami selaku Pemerintah Kampung akan mendapat teguran secara langsung maupun secara tertulis oleh Distrik, sehingga hal ini menjadi sorotan

oleh bahwa, seakan-akan kita tidak dapat mengatur dan membina masyarakat, hal tersebut bisa menjadi dampak bagi wilayah lain dan sehingga Pemerintah enggan untuk memberikan bantuan guna membantu kebutuhan warga walaupun nilai bantuan tersebut tidak seberapa”.

Solidaritas mekanik didasarkan pada sebuah kesadaran kolektif bersama, yang memusatkan pada keseluruhan kepercayaan-kepercayaan dan sentimen-sentimen yang rata-rata terdapat pada warga yang sama itu. Jalinan pada solidaritas mekanik ini merupakan kepercayaan bersama, cita-cita komitmen moral (Wulandari, 2016). Selain itu, solidaritas mekanik merupakan sesuatu yang tergantung pada individu. Individu yang mempunyai berbagai sifat yang sama serta menganut keyakinan serta pola yang sama. Oleh sebab itu sifat individualitas tidak berkembang, individual ini rutin akan dilumpuhkan oleh tekanan yang besar sekali untuk konformitas (Alhafizah., *et, al.*, 2019).

Khususnya di Kampung Bebon Jaya, Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi juga telah menerapkan sanksi kepada warga/masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan, yang merupakan kesadaran kolektif bersama warga Kampung Bebon Jaya, yang merupakan kepercayaan-kepercayaan serta cita-cita, dan tekanan yang harus dilakukan bersama oleh warga akibat dari pemberlakuan berbagai aturan yang ditetapkan oleh PEMDA Sarmi. Sanksi yang di berikan terhadap pelanggaran ialah sanksi bagi orang yang melanggar PSDD, dan tidak mematuhi protokol kesehatan, itu semua bergantung pada masing-masing individu. Akan tetapi pemberlakuan itu bagi mereka yang memiliki sifat-sifat yang sama sekali tidak mau mematuhi peraturan. Kepala Kampung juga memberikan sanksi kepada masyarakat/warga yang melakukan pelanggaran berupa teguran lisan maupun tertulis, menyapu jalan, membersihkan saluran air bagi pelanggar. Karena apabila sanksi dan aturan itu tidak dijalankan, maka Pemerintah Kampung akan mendapat

tekanan berupa teguran secara langsung maupun secara tertulis dari Pemerintah Daerah di atasnya yaitu Pemerintah Kabupaten Sarmi.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Virus Corona sangat mengancam kehidupan sosial masyarakat. Sehingga Pemerintah Kampung Bebon Jaya mengeluarkan beberapa peraturan serta himbuan-himbuan yang diberikan kepada warga/masyarakat. Sehingga diberlakukan penerapan penjagaan yang ketat Penjagaan ini dilakukan oleh warga/masyarakat yang merupakan salah satu langkah agar memutus rantai penyebaran Covid-19, pembatasan aktifitas warga/masyarakat yang melakukan aktifitasnya sesuai dengan anjuran yang ditetapkan oleh Pemerintah dan mematuhi protokol kesehatan, baik para petani, pedagang kaki lima, kios-kios, BUMN (semua Bank), buruh dan penjual keliling mulai dari Jam 6.00 WIT s/d 14.00 WIT, *social distancing*, dan menerapkan sanksi kepada warga/masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan, yang merupakan kesadaran kolektif bersama untuk diterapkan kepada warga/masyarakat, yang merupakan sebagai tekanan cita-cita kepercayaan bersama dan tekanan yang harus dilakukan bersama warga/masyarakat maupun oleh Pemerintah. Dimana aturan tersebut seolah dipaksakan dan bukan merupakan kesepakatan bersama antara warga dan Pemerintah Kabupaten, sehingga terdapat warga masyarakat yang tidak mematuhi aturan, yang melakukan pelanggaran berdasarkan kesepakatan bersama warga lainnya yang timbul akibat kejenuhan yang tinggi, serta dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonominya agar mampu bertahan hidup ditengah masa pandemi Corona.

Diharapkan masyarakat/warga dapat mematuhi aturan yang ditetapkan Bupati Sarmi tentang *social distancing*, serta himbuan-himbuan yang telah diterapkan yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah

Pusat untuk memutus rantai penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Kampung Bebon Jaya. Namun demikian, kebijakan yang dibuat Pemerintah hendaknya memuat unsure kesepakatan bersama antara si pembuat keputusan dan si pelaksana keputusan. Agar penelitian ini dapat berlanjut serta berkembang untuk mengenalkan kepada masyarakat akan pentingnya manfaat *social distancing* yang diterapkan oleh Pemerintah Kampung agar tidak terjangkau Virus Corona serta dilakukannya sosialisasi secara menyeluruh keberbagai pelosok kampung yang ada di Papua. Dimana pengetahuan masyarakat tentang *social distancing* tidaklah sama, terlebih bagi mereka yang berasal dari daerah pedalaman Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A. (2011). Belunggu Budaya Santet di Desa Randu Alas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, (Analisis Teori Hegemoni Antonio Gramsci). *Jurnal Transformasi LPM*, 7(1).
- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 253-270.
- Alhafizah, A., Bahari, Y., & Fatmawati, F. (2019). Analisis Solidaritas Mekanik Pada Organisasi Bapak Etnis Dayak Kanayatn Desa Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 8(3), 1-8.
- Buana, D. R. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) Dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(3), 217-226.
- Data Kampung Bebon Jaya Tahun 2019.
- Harjito, I. (2009). Hegemoni Gramsci. *Jurnal Majalah Ilmiah Lontar*, 23(4).
- Lestari, L. (2019). Hegemoni Kekuasaan Dalam Novel Negeri Di Ujung Tanduk Karya Tere Liye (Pendekatan Teori Hegemoni Antonio Gramsci). *Jurnal Ilmu*, 12(1).
- Miles, M. B., dan Huberman, A. Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Nastia, N. et.al. (2021). Penanganan Penyebaran Covid-19. *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 5(1), 56-67.
- Nasution, N. H., & Hidayah, A. (2021). Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan. *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia (Indonesian Health Scientific Journal)*, 6(1), 107-114.
- Nurfurqon, A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(1), 13-23.
- Pradana, A. A., & Casman, C. (2020). Pengaruh Kebijakan Social Distancing Pada Wabah Covid-19 terhadap Kelompok Rentan di Indonesia. *JKKI: Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 9(2), 61-67.
- Pratama, N. A., & Hidayat, D. (2020). Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat Memaknai Social Distancing. *JDMR: Journal Digital Media & Relationship*, 2(1), 1-10.
- Purnama, D. T., et.al. (2020). Pandemi Covid-19, Perubahan Sosial Dan Konsekuensinya Pada Masyarakat. *Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 25(1), 61-80.

- Putra, B. S. (2015). Solidaritas Kehidupan Penambang Belerang Tradisional Di Kawah Ijen Studi Pada Penambang Belerang Tradisional Kawah Ijen. *Jurnal Sosial dan Politik Universitas Airlangga*.
- Putra, M. W. P., & Kasmiarno, K. S. (2020). Pengaruh Covid-19 Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia: Sektor Pendidikan, Ekonomi Dan Spiritual Keagamaan. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 1(2), 144–159.
- Putri, R. N. (2020). Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 705–709.
- Saraswaty, A. N. (2018). Kebijakan Publik Dan Ritel Modern: Studi Kasus Pelaksanaan Kebijakan Plastik Berbayar. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(1), 113–142.
- Siregar, A. K., & Jubba, H. (2020). Dampak Wabah Corona Virus Disease Terhadap Budaya Ibadah Umat Muslim Dan Kebijakan Pemerintah. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 1(2), 131–143.
- Siswati, E. (2017). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 5(1), 11–33.
- Wahidah, I., *et.al.* (2020). Pandemi Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 11(3), 179–188.
- Wulandari, P. (2016). Studi Antara Solidaritas Sosial Mekanik dan Solidaritas Sosial Organik Warga Madura dalam Wardah PERKIM Kota Makassar. *Jurnal Sosiologi*, 2(3).
- Wawancara dengan Bapak Agung (2020). Masyarakat Kampung Bebon Jaya Distrik Bonggo.
- Wawancara dengan Bapak Hanafi (2020). Plt. Kepala Kampung Bebon Jaya Distrik Bonggo.
- Wawancara dengan Bapak Turudi (2020). Sekretaris Kampung Bebon Jaya Distrik Bonggo.